

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19
TAHUN 2020 DI WILAYAH KELURAHAN KALIRUNGKUT
KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh :
IRHAM MIFTAHUL HUDA
NIM : G02219015**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Irham Miftahul Huda, G02219015, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar – benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

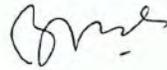
Surabaya, 26 Juni 2023


Irham Miftahul Huda
G02219015

Surabaya, 8 Juni 2023.....

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Dr. Imam Buchori, SE.,M.Si.,CITAP

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID-19 TAHUN 2020 DI WILAYAH KELURAHAN KALIRUNGKUT KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

Oleh

Irham Miftahul Huda

NIM: G02219015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Imam Buchori, SE., M.Si., CITAP
NIP. 196809262000031001
(Penguji 1)
2. Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA
NIP. 198905282019032014
(Penguji 2)
3. Hastanti Agustin Rahayu, SE., M.Acc., Ak., CA., BKP
NIP. 198308082018012001
(Penguji 3)
4. Mohammad Dliyaul Muflihah, S.E.I., M.E
NIP. 202202001
(Penguji 4)

Tanda Tangan

Buchori

Ratna

Hastanti

Mohammad



Dr. Situngkir Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irham Miftahul Huda
NIM : G02219015
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address : g02219015@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Covid-19

Tahun 2020 di Wilayah Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2023

Penulis

(Irham Miftahul Huda)

ABSTRAK

Sistem pengendalian internal menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) suatu kaidah yang didesain, disusun oleh manajemen dan saling terintegrasi, terkoordinasi antar sistem lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan visi perusahaan atau organisasi. Komponen yang terdapat pada sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal yang digunakan pada pengelolaan bantuan langsung tunai tahun 2020 di wilayah Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Jenis penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Paradigma interpretif merupakan cara pandang seseorang dibalik realitas sosial, fakta yang berada disekelilingnya didasarkan atas pengalaman informan. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder, kemudian analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan bantuan sosial terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini diperoleh melalui unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal berdasarkan perspektif COSO. Terdapat hambatan yang ditemui dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran bantuan permakanan adanya penyesuaian anggaran dikarenakan pembaharuan data yang masuk sehingga alokasi anggaran melebihi budget yang ditetapkan.

Penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu pihak kelurahan dapat memanfaatkan website yang ada dalam penginformasian prosedur pengajuan baru bantuan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu dari monitoring terhadap pembaharuan data miskin, sasaran penerima bantuan perlu dilakukan pemfilteran secara berkelanjutan agar sasaran bantuan dinyatakan valid.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Pengelolaan Bantuan, Sistem Pengendalian Internal.

ABSTRACT

The internal control system according to the International Federation of Accountants (IFAC) is a rule that is designed, arranged by management and mutually integrated, coordinated among other systems that aim to realize the vision of a company or organization. The components contained in the internal control system include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This study aims to find out the extent to which the internal control system is used in the management of direct cash assistance in 2020 in the Kalirungkut area, Rungkut District, Surabaya City.

This type of research includes qualitative research with a case study approach. The interpretive paradigm is a person's point of view behind social reality, the facts around him are based on the experiences of informants. This research in data collection using observation, interviews and documentation. Types and sources of data using primary and secondary data, then data analysis using a credibility test with triangulation techniques.

The results of the research on the implementation of the internal control system in the management of social assistance are carried out and running well. This is obtained through the elements that make up internal control based on the COSO perspective. There are obstacles encountered in preparing the accountability report on the use of the food aid budget, there are budget adjustments due to updating of incoming data so that the budget allocation exceeds the set budget.

This study provides a recommendation that the village administration can use the existing website to inform the public about the procedure for applying for new social assistance. In addition to monitoring the updating of poor data, the target recipients of assistance need to be filtered on an ongoing basis so that the aid targets are declared valid.

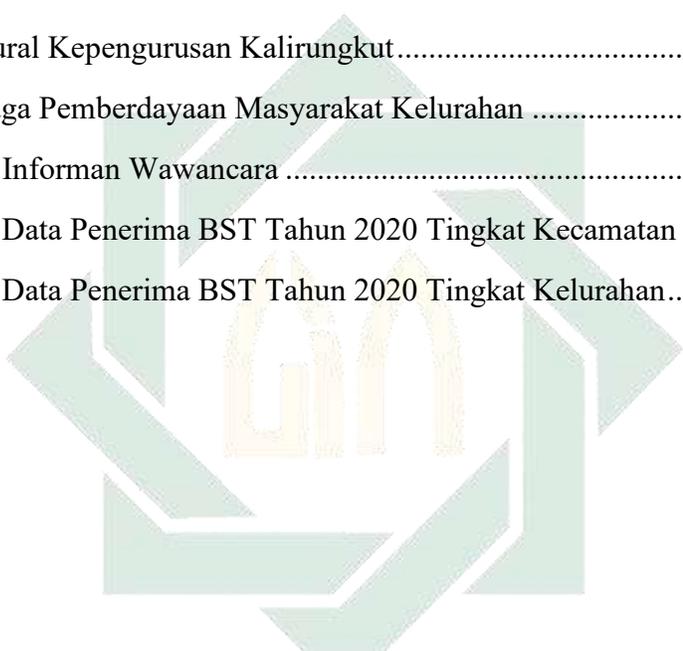
Keywords : *Social Assistance, Assistance Management, Internal Control System.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
BAB 2 LANDASAN TEORI	17
2.1 Kajian Teoritis	17
2.1.1 Sistem Pengendalian Internal	17
2.1.2 Manajemen	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	39
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
1.1 Jenis Penelitian	41
1.1.1 Paradigma Interpretif.....	42
1.1.2 Pendekatan Studi Kasus.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran BST di Surabaya	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Struktural Kepengurusan Kalirungkut.....	56
Tabel 4.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	56
Tabel 4.3 Daftar Informan Wawancara	58
Tabel 4.3 Rekap Data Penerima BST Tahun 2020 Tingkat Kecamatan	76
Tabel 4.4 Rekap Data Penerima BST Tahun 2020 Tingkat Kelurahan.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

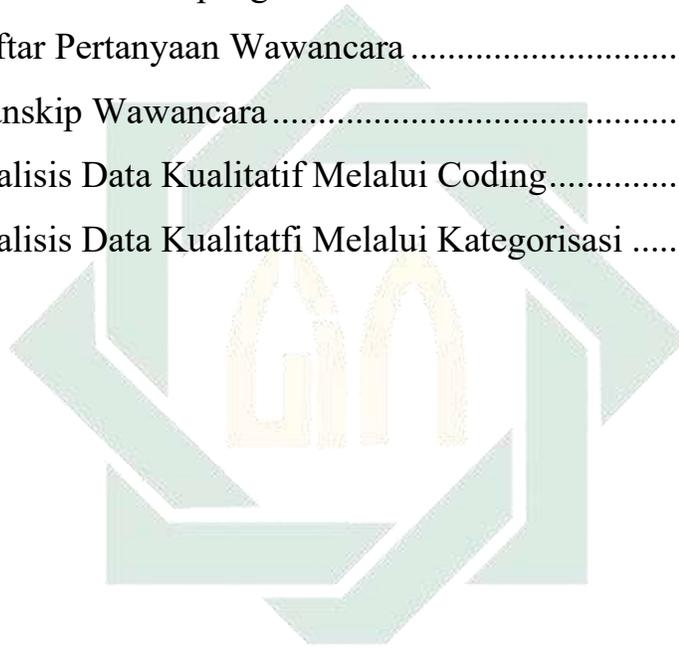
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Peta Kota Surabaya.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kalirungkut.....	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 2 Dokumentasi Lapangan	104
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara	111
Lampiran 4 Transkrip Wawancara	114
Lampiran 5 Analisis Data Kualitatif Melalui Coding.....	133
Lampiran 6 Analisis Data Kualitatif Melalui Kategorisasi	140



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 Tiongkok digemparkan adanya penyakit *pneumonia* misterius yang berasal dari Kota Wuhan. Penyakit ini bermula dari pedagang di pasar tradisional yang menjual binatang liar. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas setempat bahwa sekuensing genom menunjukkan agen penyebabnya adalah *coronavirus* baru. Covid-19 telah menyebar di berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit corona menjadi kejadian yang luar biasa dengan istilah *Novel Coronavirus*. Covid-19 ini memiliki tingkat penularan yang tinggi dan dapat menginfeksi berbagai kalangan baik dari anak-anak sampai lansia. Penyebaran ini terjadi melalui udara yang membawa virus (droplets) dan adanya kontak langsung dengan masyarakat yang terinfeksi covid-19. Untuk meminimalisir adanya penularan otoritas setempat menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah (Siti Nur Aida, 2021).

Pemerintah Tiongkok memberlakukan aturan *lockdown* atau karantina wilayah. Istilah *lockdown* atau karantina wilayah adalah upaya pembatasan mobilitas penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi adanya penyakit menular dengan mengunci akses masuk atau keluar dalam suatu wilayah untuk mengendalikan penyebaran penyakit (Peraturan Pemerintah RI, 2018). Aturan

lockdown ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tercatat minus 6,8 % . Hal tersebut terjadi dikarenakan dampak adanya covid-19. Dari sektor industri manufaktur berdasarkan data yang diperoleh terkoreksi penurunan sebesar 1,1 persen. Penurunan tersebut diakibatkan perusahaan menonaktifkan sementara kegiatan produksi akibat pemberlakuan *lockdown*. Dampak dari berhentinya kegiatan produksi menyebabkan sektor ritel mengalami penurunan secara drastis sebesar 15,8 % (CNN, 2020).

Indonesia mengkonfirmasi kasus perdana covid-19 pada tahun 2020 tepatnya di bulan Maret dan telah menyebar diseluruh provinsi di Indonesia. Berbagai pengendalian untuk menekan laju penyebaran covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), PSBB transisi, Mikro *lockdown*, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (BBC, 2021). Dalam aturan mengenai PPKM ini dijelaskan mengenai sektor-sektor yang diizinkan beroperasi selama PPKM yaitu sektor kesehatan, perkantoran, energi dan sumber daya mineral, perbankan, transportasi, pusat perbelanjaan dan restoran dengan kapasitas berdasarkan level PPKM. PPKM ini dinilai efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19, namun dampak dari pemberlakuan PPKM ini dirasakan oleh masyarakat dikalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (Menteri Dalam Negeri, 2021).

Aktivitas perekonomian Indonesia turut terkena dampak adanya covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07 % . Dari beberapa Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha, yang berkontraksi paling dalam adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 % . Selanjutnya dari sisi pengeluaran hampir seluruh komponen berkontraksi, namun sektor ekspor barang dan jasa merupakan sektor yang berkontraksi terdalam sebesar 7,07 % . Sedangkan untuk sektor impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71 % (Badan Pusat Statistik, 2021). Dampak lain dari PPKM juga dirasakan di industri manufaktur yang berimbas pengurangan jumlah produksi akibat larangan ekspor. Hal tersebut juga berpengaruh pengurangan jam kerja karyawan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data tahun 2020 bahwa tingkat pengangguran terbuka per Agustus tahun 2020 sebanyak 7,07 % dan mengalami kenaikan menjadi 1,84 % . Pengangguran terbuka disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya keterampilan atau pengalaman, minimnya informasi lowongan pekerjaan dan krisis ekonomi. Selanjutnya terdapat 29.12 juta orang atau 14,28 % masyarakat yang termasuk dalam penduduk usia kerja terdampak adanya covid-19 yang terdiri dari pengangguran yang diakibatkan adanya covid-19 sebesar 2.56 juta orang sedangkan dampak lainnya yaitu pengurangan jam kerja sebesar 24.03 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dimasa *new normal* dan meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah melalui kementerian keuangan dan kementerian sosial memberikan bantuan atau jaminan sosial untuk meringankan beban masyarakat ditengah wabah covid-19. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial. Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang, jasa, dan barang yang diberikan kepada masyarakat, individu atau kelompok yang berkategori masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin serta masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun jenis bantuan sosial yang menurut peraturan Menteri Sosial yaitu Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Sosial untuk kelompok usaha ekonomi, Program Keluarga Harapan, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutihalu) (Menteri Sosial, 2019).

Selain berbagai program bantuan dari Kementerian Sosial, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan dana desa di era wabah covid-19. Dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 yang telah dilakukan perubahan berulang kali dengan menerbitkan peraturan terbaru Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan tersebut memuat penggunaan dana desa dimasa covid-19 yang dialokasikan untuk percepatan dan penanggulangan wabah covid-19.

Dimasa covid-19 dana desa dapat dimanfaatkan untuk program kampung tangguh atau desa tanggap covid-19 serta pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu pemanfaatan dana desa diprioritaskan dalam dua prioritas yaitu pembangunan infrastruktur swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mendapat menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menumbuhkan perekonomian desa. Prioritas terakhir yaitu percepatan penanganan covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu serta tidak menerima atau tidak terdaftar dalam program bantuan Kementerian Sosial yang termuat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Saragih et al., 2021). Nantinya Bantuan Langsung Tunai akan disalurkan kepada penerima manfaat selama 3 bulan senilai Rp 600.000 yang diterima setiap bulannya. Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dilaksanakan di desa atau kelurahan diseluruh indonesia.

Seiring penyaluran bantuan sosial ini menimbulkan berbagai permasalahan, dimana ditemukan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada RW 05 Kelurahan Kalijudan, dalam permasalahannya adanya ketidaksinkron data yang digunakan merupakan data yang sudah lama sehingga masyarakat yang seharusnya tercover untuk menerima bantuan justru tidak tercover menerima bantuan. Pada saat proses survei dengan memadukan data lama ditemukan bahwa nama-nama tersebut merupakan masyarakat yang

mampu dalam segi perekonomian dan tidak berhak untuk menerima bantuan. Hal lainnya juga terjadi pada masyarakat mempunyai usaha dimasa pandemi yang masih beroperasi justru menerima bantuan (Risky, 2020). Permasalahan lain juga terjadi di Kecamatan Simokerto, berbeda dengan Kelurahan Kalijudan dalam permasalahan di Kecamatan Simokerto dimana terdapat 15 nama warganya yang sudah meninggal terdata bantuan langsung tunai. Untuk meminimalisir adanya kesalahan data bantuan, maka bantuan tersebut tidak disalurkan dan diberikan kepada masyarakat yang layak menerima serta melakukan pembaharuan data (Abdul Hakim, 2020).

Menurut survei yang dilakukan Sirojudin Abbas Direktur Eksekutif SMRC (Saiful Mujani *Research and Consulting*) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program bantuan covid-19, menunjukkan 49% warga menilai bantuan yang diberikan dinilai masih belum tepat sasaran, sedangkan 37% menilai bantuan tersebut tepat sasaran. Dari keseluruhan bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat. Dari berbagai jenis bantuan Kementerian Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai. Diperoleh 50% masyarakat menerima bantuan sosial namun dalam bentuk sembako saja. Selanjutnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16,6% menerima bantuan PKH. Sebanyak 11,8% masyarakat menerima bantuan sembako dan bantuan PKH. Dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan

Rungkut merupakan sebuah kecamatan yang berada di sebelah tenggara Kota Surabaya. Wilayah Kecamatan Rungkut ini mencakup enam Kelurahan yaitu Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Medokan Ayu, dan Kelurahan Penjaringan Sari. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Rungkut ini menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya sebanyak 121.234 jiwa pada tahun 2019. Adapun untuk jumlah penduduk di wilayah Kalirungkut sendiri sebanyak 24.184 jiwa (Surabaya, 2019).

Proses pendataan untuk program bantuan dari Kementerian Sosial yang dilakukan oleh perangkat RT 04 Kelurahan Kalirungkut melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya. Adapun kriteria yang termasuk dalam proses pendataan bantuan adalah masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian, masyarakat lansia, anak yatim piatu, janda atau duda dan masyarakat yang berdomisili di Surabaya. Masyarakat mengumpulkan data yang diperlukan dalam bentuk KK. Setelah data dari warga terkumpul, maka data – data tersebut akan diinput melalui sistem yang terintegrasi dengan Dinas Sosial yaitu Si Keluarga Miskin dengan memperhatikan kriteria yang sudah ditetapkan. Pada tahapan selanjutnya adalah survei yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menentukan kelayakan dari penerima bantuan. Proses survei ini juga memperhatikan berbagai yaitu kelayakan hunian, kondisi perekonomian serta kondisi sosial. Setelah proses

survei selesai, tahapan selanjutnya merupakan proses verifikasi data hingga finalisasi dilakukan oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan pra-pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan pelaksana tugas Kalirungkut dan Sekretaris Kalirungkut (Bapak Kokoh Bactiyar). Ditemukan permasalahan yang terjadi mengenai pendataan bantuan di wilayah Kalirungkut yaitu ditemukan masyarakat yang terdampak adanya covid-19 tidak terdata sebagai penerima bantuan, masyarakat yang berpindah tempat domisili namun masih terdata bantuan, masyarakat yang mampu dari segi perekonomian terdata penerima bantuan. Perbedaan data bantuan ini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya ketelitian dan pengawasan pada saat proses pengajuan MBR baru hingga proses pengesahan data keluarga miskin. Selain itu kurangnya informasi dari perangkat rt maupun rw mengenai masyarakat dilingkungannya yang berhak mendapatkan bantuan. Data bantuan yang timpang tindih menimbulkan persepsi negatif di masyarakat hingga menyebabkan tingkat kepercayaan pada pemerintah menurun. Pentingnya pembaharuan data dan keterbukaan informasi mengenai program bantuan sosial merupakan keberhasilan dalam penyaluran bantuan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizka Yunika Ramly dkk (2021) dengan judul “Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Gorontalo” menggunakan deksriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penyaluran bantuan

sosial yang dilakukan di Provinsi Gorontalo telah sesuai prosedur yang termuat dalam Kepmensos No. 5HUK-2020. Dalam penyaluran bantuan melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah didistribusikan sesuai dengan kriteria penerima. Namun dalam pendistribuan tersebut terdapat permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jenis dan kriteria penerima bantuan. Selain itu ditemukan adanya pemberkasan data masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemrosesan bantuan sehingga data dari masyarakat tidak dapat diproses (Yunika & Shella, 2021).

Pada penelitian Evi Nainah dkk (2022) melalui risetnya “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai di Kota Bandung” menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bahwa dalam pengelolaan bantuan sosial tunai beberapa masyarakat menyatakan menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, namun dari jenis bantuan tersebut tidak berasal dari program Bantuan Sosial Tunai melainkan bantuan sembako dan bantuan UMKM. Selain itu masyarakat lainnya menilai dari program Bantuan Sosial Tunai dinilai belum tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dirasakan oleh pengurus dilapangan dan masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang menyebabkan kesalahpahaman pengurus dilapangan dengan arahan dari pemerintah setempat (Nainah et al., 2022).

Puryanti dkk (2022) melalui riset yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)” menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Bandarsyah ditemukan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam kriteria penerima bantuan. Faktor lainnya terdapat pada kapabilitas sumber daya yang dimiliki masih belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan bantuan sosial sehingga dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Pada faktor pendistribuan bantuan sosial yang berkerja sama dengan PT Pos Indonesia sangat memudahkan masyarakat dalam mencairkan bantuan (Puryanti et al., 2022).

Nurwani (2018) melauai risetnya tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Pare-Pare” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 jenis PMKS, terdapat 5 PMKS memperoleh anggaran dalam setiap tahunnya yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 - 2016. Dari segi sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pare-Pare belum terpenuhi dengan baik yaitu pada sub pengendalian atas pengelolaan sistem infomasi, sub unsur pencatatan, sub unsur pemantauan dan sub unsur evaluasi terpisah (Nurwani, 2018).

Adapun permasalahan pengelolaan bantuan ditemukan pada penelitian terdahulu seperti penelitian menurut Puryanti dkk (2022) dimana informasi dalam bentuk sosialiasasi tentang program BST belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Evi Nainah

dkk (2022) pada penyaluran program bantuan sosial tunai beberapa masyarakat memperoleh bantuan namun bukan dari bantuan sosial tunai. Dari segi sosialisasi mengenai program dana bantuan sosial tunai mayoritas masyarakat belum mengetahui dan bantuan yang diasalurkan masih belum tepat sasaran.

Berangkat dari permasalahan pada studi terdahulu dan pra pendahuluan, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam pada obyek pengelolaan bantuan langsung tunai di wilayah Kalirungkut RT 04 dengan memfokuskannya pada penerapan sistem pengendalian internal dan pengelolaan bantuan. Subyek pada penelitian ini adalah ketua RT 04, Kelurahan Kalirungkut serta Dinas Sosial Kota Surabaya. Peneliti memilih mengkaji obyek tersebut karena berdasarkan kegiatan pra pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta beberapa permasalahan yang ditemukan di beberapa artikel, bahwa pada pengelolaan bantuan yang terjadi selama pandemi covid-19 masih ditemukannya penyaluran yang tidak sesuai di lapangan serta pendataan bantuan yang masih terdapat perbedaan. Adanya program bantuan covid-19 dari kementerian sosial menjadi sorotan dari berbagai kalangan pasca adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Selain itu besarnya anggaran yang dialokasikan ini cukup besar dan rawan adanya penyelewengan.

Dari beberapa penelitian terdahulu hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada pemfokusan fenomena. Penelitian terdahulu hanya memfokuskan masalah penelitian pada pengelolaan bantuan sosial yang dilihat berdasarkan kesejahteraan masyarakat,

implementasi kebijakan pengelolaan bantuan, pengelolaan mulai dari penganggaran sampai tahap pelaporan. Dari segi teori, jenis teori yang digunakan yaitu konsep kebijakan publik, bantuan sosial tunai, efektivitas dan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu bentuk implementasi sistem pengendalian internal yang mencakup keseluruhan pengendalian atau pengawasan pada pengelolaan bantuan mulai dari alokasi anggaran, tahapan pendataan hingga finalisasi penerima bantuan.

Melalui literatur serta permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengeksplorasi lebih mendalam dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Era Covid-19 Tahun 2020 Di Wilayah Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berisi gambaran suatu obyek atau permasalahan dalam penelitian, berikut mengenai identifikasi masalah :

1. Ketidaksinkron atau ketidaksesuaian data bantuan yang menyebabkan adanya bantuan yang kurang tepat sasaran.
2. Adanya proses pembaharuan data bantuan yang masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Belum terintegrasinya pendataan bantuan yang sesuai sehingga masih ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran
4. Belum terpenuhinya pengendalian internal selama program bantuan sosial.

1.2.2 Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah. Tujuan adanya batasan masalah adalah untuk lebih memfokuskan masalah penelitian sehingga dapat dibahas secara mendalam. Berdasarkan identifikasi masalah maka bentuk batasan masalah yaitu adanya pengelolaan bantuan yang belum sesuai dan belum maksimalnya penerapan dari sistem pengendalian internal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka bentuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan

pengelolaan bantuan langsung tunai tahun 2020 di wilayah Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal yang digunakan pada pengelolaan bantuan langsung tunai tahun 2020 di wilayah Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui riset ini diharapkan menjadi evaluasi atau dapat dikembangkan terkait implementasi sistem pengendalian internal yang mencakup keseluruhan komponen sesuai dengan perspektif COSO. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan pada penelitian yang akan datang khususnya pada bidang sistem pengendalian internal.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Sebagai penunjang atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat fenomena tentang sistem pengendalian internal maupun pengelolaan program bantuan sosial. Selain itu dapat menambah koleksi kepustakaan pada bidang pengendalian internal.

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis memperoleh pengalaman secara langsung, pengetahuan baru tentang implementasi sistem pengendalian internal meliputi aktivitas monitoring yang terdapat pada bantuan sosial. Selain itu dari segi pengelolaan bantuan, peneliti dapat mengetahui alur proses pengajuan sampai pembaharuan bantuan sosial.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dari bantuan sosial yang selama ini masih dipermasalahkan.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan riset, literasi serta bahan evaluasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah untuk meningkatkan aktivitas monitoring atau evaluasi terkait penggunaan DTKS pada program bantuan sosial maupun program bantuan lainnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah perencanaan organisasi dan semua pengukurannya yang diambil oleh perusahaan untuk mengamankan aset, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, mendorong efisiensi dan dipercainya data akuntansi (Pramana et al., 2021). Pandangan serupa diutarakan oleh organisasi profesi akuntan yaitu *International Federation of Accountants* (IFAC) sistem pengendalian internal ialah suatu kaidah yang didesain, disusun oleh manajemen dan saling terintegrasi, terkoordinasi antar sistem lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan visi perusahaan atau organisasi. Melalui sistem pengendalian internal maka organisasi atau perusahaan dapat mengawasi serta mendeteksi berbagai aktivitas seperti adanya penyalahgunaan, perilaku menyimpang serta meminimalisasi risiko bisnis. (Supriyono et al., 2018).

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mendefinisikan internal control sebagai proses yang dipengaruhi oleh manajemen rencana serta oleh personil lain, dan juga pihak-pihak yang memberi keyakinan yang cukup dalam hal pencapaian

tujuan berupa keandalan pelaporan keuangan (Sudarmanto et al., 2021). Dalam kontrol internal berisi rencana organisasi serta metode yang tersusun serta terkoordinasi dalam pengukuran. Selanjutnya menurut COSO (*Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) memaparkan mengenai pengendalian intern merupakan suatu rencana, prosedur yang dirancang, didesain oleh berbagai elemen dalam organisasi yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mewujudkan, mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan melibatkan karyawan hingga manajemen puncak. Menurut COSO mengenai tujuan dari internal kontrol yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi, kehandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan maupun perundang-undangan yang berlaku (Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, 2009). COSO (*Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) membagi komponen sistem pengendalian internal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Enviroment*)

Lingkungan pengendalian merupakan komponen yang paling utama atau paling mendasar dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam lingkungan pengendalian berusaha membangun kesadaran akan pentingnya pengendalian di organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri unsur yang membentuk didalamnya seperti

beroperasi apakah efektif dengan tujuan entitas yang akan dicapai (Rai, 2008).

Untuk mencegah dan mendeteksi adanya tindakan atau penyimpangan yang menghambat tujuan perusahaan, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang terbagai dalam tiga jenis yaitu:

1. Pengendalian Pencegahan (*Preventive Controls*)

Merupakan pengendalian yang dilakukan untuk memprediksi adanya perilaku yang menyimpang atau menentang dari tujuan suatu organisasi dengan cara pencegahan melalui suatu kebijakan atau peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Pendeteksian (*Detective Controls*)

Pada pengendalian preventif merupakan pengendalian untuk pencegahan maka pada pengendalian detektif ini merupakan pengendalian yang mendeteksi adanya tindakan yang sudah terjadi melalui alat deteksi, prosedur, teknik dengan mengidentifikasi suatu permasalahan.

3. Pengendalian Koreksi

Pengendalian koreksi merupakan pengendalian untuk melakukan evaluasi dari proses identifikasi pada pengendalian detektif agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali (Sudarmanto et al., 2021).

2.1.2 Manajemen

Pengertian manajemen secara umum, manajemen merupakan proses pengelolaan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah dicanangkan dengan pendelegasian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya. Selain dari *skill* atau kompetensi khusus, pengelolaan terhadap suatu kinerja juga memerlukan orang-orang yang dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang kreatif dan inovatif (Trisakti, n.d.). Pandangan lain juga dikemukakan John Suprihanto dalam bukunya, manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan terhadap kinerja maupun penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi ditetapkan (Suprihanto, 2018).

Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan upaya pemanfaatan sumber daya manusia pada suatu organisasi yang dipunyai dan dipergunakan secara tepat dan sesuai, sehingga bersama tercapai tujuan organisasi secara maksimal (Ni Wayan Dian Irmayani, 2021). Adapun peran dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai berikut:

- a. Perencanaan merupakan proses perancangan sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

- b. Pengorganisasian meliputi mendesain struktur organisasi yang mencakup didalamnya menentukan tugas, mendeskripsikan hubungan antar pekerjaan maupun antar anggota serta mendelegasikan individu maupun kelompok sesuai dengan skill yang dikuasai.
- c. Pengarahan atau Penggerakan yaitu memberikan motivasi, semangat kepada elemen-elemen yang terdapat dalam organisasi untuk turut andil dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang direncanakan.
- d. Pengendalian yaitu kegiatan menilai dan mengukur rencana yang telah tersusun dan terlaksana untuk menentukan apakah sudah sejalan dengan tujuan organisasi (Ni Wayan Dian Irmayani, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam mengkaji fenomena dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rizka Yunika Ramly, Shella Budiawan. (Yunika & Shella, 2021)	Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Gorontalo.	Subyek : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Obyek : Penyaluran bantuan sosial covid-19 di Provinsi Gorontalo	Jenis metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan jenis data primer dari hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan berupa data deskriptif dari hasil wawancara dengan informan yang telah disusun kemudian dianalisis dengan konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan.	Hasil penelitian diperoleh bahwa penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di Provinsi Gorontalo telah sesuai prosedur yang termuat dalam Kepmensos No. 5HUK-2020. Dalam penyaluran bantuan melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah didistribusikan sesuai dengan kriteria penerima. Namun dalam pendistribuan tersebut terdapat permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jenis dan kriteria penerima bantuan.	Persamaan : Jenis penelitian, Perbedaan : Pada penelitian terdahulu berfokus pada sistem penyaluran bantuan sosial sementara pada penelitian ini berfokus pada implementasi sistem pengendalian internal pada pengelolaan bantuan, subyek penelitian, dan pendekatan penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					selain itu diperlukannya sosialisasi mengenai regulasi dan mekanismya oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan informasi yang tumpang tindih.	
2.	Nurwani. (Nurwani, 2018)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Pare-Pare.	Subyek : Pegawai Dinas Sosial Kota Pare-Pare, Bappeda , Inspektorat dan Masyarakat Obyek : Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bantuan	Jenis penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan data kuantitatif diperoleh dari data anggaran belanja bantuan sosial tahun 2013-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 jenis PMKS, terdapat 5 PMKS memperoleh anggaran dalam setiap tahunnya yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 - 2016. Dari segi sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pare-pare belum terlaksana dengan baik yaitu pada sub	Persamaan : Metode penelitian, teknik pengumpulan data, sama - sama meneliti mengenai sistem pengendalian internal dan pengelolaan bantuan Perbedaan : subyek penelitian dan pendekatan penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					pengendalian atas pengelolaan sistem infomasi, sub unsur pencatatan, sub unsur pemantauan dan sub unsur evaluasi terpisah.	
3.	Fabiana Meijon Fadul. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)	Analisis Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Bawean Kabupaten Semarang Tahun 2020.	Subyek : Berada di Desa Kandangan Kecamatan Bawean Obyek : Pengawasan pada dana desa	Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulam data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan reduski data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian diperoleh bahwa pengawasan dana desa di Kecamatan Bawean terdapat tiga tahapan yaitu tahap penyaluran, penggunaan, dan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun terdapat permasalahan di tahap pasca penyaluran dimana ditemukan adanya perbaikan berkas	Persamaan : metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data Perbedaan : pada penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan pada pengelolaan dana desa sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sistem pengendalian internal pada pengelopaan bantuan, subyek penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					<p>administrasi yang dilakukan oleh Inspektorat yang termuat pada LHP. Adanya pengawasan dana desa ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang merupakan pengguna anggaran akan mengetahui pertanggung jawaban perangkat desa dalam penggunaan anggaran</p>	
4.	Gede Suarsana, I Gede Putu Banu Astawa. (Suarsana, 2022)	Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance:	Subyek : Perangkat Desa Lemukih Kabupaten Buleleng Obyek : Peran APIP dan Aparatur Desa pada pengelolaan dana desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma non-positivistik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh	Hasil penelitian bahwa : 1) Dalam perencanaan pengelolaan dana desa telah disusun sesuai dengan RKP Desa yang diikuti oleh masyarakat desa. Namun terdapat permasalahan yaitu kurangnya keaktifan	Persamaan : Metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data Perbedaan : Pada penelitian terdahulu obyek penelitian yaitu pengelolaan keuangan desa sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian yaitu pengelolaan bantuan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Pendekatan Konsep Karmaphala.		melalui wawancara dengan APIP. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan audit, laporan keuangan desa serta dokumen lainnya. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi.	masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau ide yang membangun dalam proses kegiatan yang dilakukan desa. 2) Penggunaan dana desa telah dikelola dengan semestinya dimana perangkat desa merasa takut melakukan kecurangan dan mempercayai adanya karmaphala. 3) Pengawasan pada pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan SOP walaupun tidak adanya aturan mengenai karmaphala dan para perangkat desa mempercayai adanya karmaphala pada setiap tindakan yang dilakukan.	langsung tunai, subyek penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					4) Bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sudah sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus mengenai penggelapan dan sebagainya.	
5.	Retno Murni Sari. (Tama et al., 2020)	Internal Control Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.	Subyek : Pemerintah Desa Pojok Kecamatan Ngantru Obyek : SPIP pada pengelolaan dana desa	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jenis data yang digunakanyaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur. Selanjutnya data sekunder diperoleh melalui dokumentasi,	Hasil penelitian diperoleh sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan dana desa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu mewujudkan transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas terhadap penggunaan dana desa. Selain itu	Persamaan : metode penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data Perbedaan : Subyek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada spip pengelolaan dana desa sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sistem pengendalian internal,transparansi pengelolaan dana bantuan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				buku, undang - undang, dan medai elektronik.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Dana Desa 2018.	
6.	Dian Herdiana. (Herdiana, 2020)	Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19.	Subyek : Penyaluran di Provinsi Jakarta dan Jawa Barat Obyek : Pengawasan kolaboratif pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19	Jenis penelitian yang digunakan merupakan kualitatif dengan analisis deskriptif. dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laman web. teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.	Pelaksanaan pengawasan belum menunjukkan secara menyeluruh dalam kebijakan bantuan sosial covid-19. Bentuk pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan internal saja yang tidak mengaitkan pihak lain termasuk masyarakat. Melalui hal tersebut diperlukan solusi untuk bentuk pengawasan dalam pelaksanaan bantuan sosial yang saling berkerja sama antar stakeholder untuk menghasilkan pengawasan yang	Persamaan : Metode penelitian dan teknik analisis data Perbedaan : Peneliti terdahulu berfokus pada pengawasan kolaboratif sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan sistem pengendalian internal

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					integratif dan sinergis.	
7.	Iin Ningsih. (Ningsih, 2022)	Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.	Subyek : Masyarakat penerima BLT di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Obyek : Program bantuan langsung tunai	Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif atau <i>ex post facto</i> dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengampilan sampel menggunakan metode cluster random sampling.	1) Dalam pendataan calon penerima bantuan masih dinilai belum tepat sasaran dengan menggunakan metode pendataan melalui kasat mata. 2) Penyaluran dan pencairan bantuan lansung tunai sudah sesuai dengan juknis dan transparan sehingga masyarakat mengetahui prosesnya secara langsung. 3) Pada proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini dilakukan pengawasan dan pengevaluasian mulai dari pendataan bantuan hingga penyaluran.	Persamaan : Jenis penelitian Perbedaan : Pada penelitian terdahulu berfokus pada bantuan langsung tunai BBM sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bantuan langsung tunai akibat covid-19, subyek penelitian, dan teknik pengumpulan data.

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					4) Melalui program bantuan langsung tunai ini masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	
8.	Bramanty Sevitha Dewi, Sukidin, Lisani Oktavisanti. (Dewi et al., 2021)	Pengelolaan Bantuan Sosial Pada Perumahan Arbain Kampung Janda Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.	Subyek : Pengurus perumahan arbain terdiri dari ketua rt, bendahara, ketua tpq dan sekretaris Obyek : Pengelolaan bantuan sosial pada kampung janda	Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode.	Dalam pengelolaan bantuan sosial di Perumahan Arbain Kampung Janda yang berada di Kabupaten Pasuruan ini terdapat tiga prosedur yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian masalah. Dalam pelaksanaan bantuan sosial ini dikelola dengan baik hal ini terlihat dari para pengelola menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem	Persamaan : metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji validitas data Perbedaan : Subyek penelitian dan fokus penelitian terdahulu yaitu pengelolaan dan pelaksanaan bantuan sosial, sedangkan fokus penelitian ini adalah implementasi sistem pengendalian internal dari keseluruhan pengelolaan bantuan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					<p>atau aturan yang telah diterapkan. selanjutnya untuk mengendalikan atau meminimalisir adanya permasalahan bantuan maka pengelola melakukan pengawasan kinerja dan segala permasalahan yang berhubungan dengan bantuan sosial dilaporkan dalam bentuk tertulis atau lisan.</p>	
9.	Puryanti, Dian Herdiana, Tri Darmayanti. (Puryanti et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah	Subyek : Berada di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna Obyek : Implementasi Kebijakan Pengelolaan BST	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. dalam memperoleh data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan beberapa tahapan yaitu pemetaan dan identifikasi aktor,	Hasil penelitian diperoleh, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Bandarsyah ditemukan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan	Persamaan : Metode penelitian dan teknik pengumpulan data Perbedaan : Pada penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pengelolaan bantuan sosial tunai sedangkan pada penelitian ini berfokus pada

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Kabupaten Natuna)		menyusun kategori dan klasifikasi peran-peran aktor, mengidentifikasi keterkaitan relasi antar aktor, menginterpretasi serta menjelaskan dinamika relasi aktor , dan kesimpulan.	persepsi yang berbeda dalam kriteria penerima bantuan. Faktor lainnya terdapat pada kapabilitas sumber daya yang dimiliki masih belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan bantuan sosial sehingga dapat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Pada faktor pendistribuan bantuan sosial yang berkerja sama dengan PT Pos Indonesia sangat memudahkan masyarakat dalam mencairkan bantuan.	keseluruhan implementasi sistem pengendalian internal pada pengelolaan bantuan dan subyek penelitian.

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
10.	Evi Nainah, Reza Mauldy Raharja. (Nainah et al., 2022).	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai di Kota Bandung	Subyek : Masyarakat Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung Obyek : Pengelolaan bantuan sosial tunai di Kota Bandung	menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya uji validitas atau keabsahan data menggunakan uji credibility, transferbility, dependability dan confirmability.	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pengelolaan bantuan sosial tunai beberapa masyarakat menyatakan menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, namun dari jenis bantuan tersebut tidak berasal dari program Bantuan Sosial Tunai. selain itu masyarakat lainnnya menilai dari program Bantuan Sosial Tunai dinilai belum tepat sasaran. hal tersebut disebabkan karena	Persamaan : metode penelitian, teknik pengumpulan data dan masalah penelitian yaitu pengelolaan bantuan Perbedaan : penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan bantuan sosial tunai, pada penelitian ini berfokus pada implementasi dari sistem pengendalian internal pada bantuan langsung tunai dan subyek penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					kurangnya sosialisasi yang dirasakan oleh pengurus dilapangan dan masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang menyebabkan kesalahpahaman pengurus dilapangan dengan arahan dari pemerintah setempat.	
11.	Orce Kabunggul, Yeni Husnaeni, Kumba Digidowiseso. (Kabunggul et al., 2023)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	Subyek : Dinas Sosial DKI Jakarta Obyek : Kinerja SPIP pada bantuan covid-19	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan pendekatan etnometodologis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pelaksanaan SPIP dalam bantuan penanganan covid-19 secara umum sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Tetapi dalam implementasi dan evaluasi masih dibutuhkan meliputi pelatihan etika, penilaian fungsi pendamping dan identifikasi risiko	Persamaan : Metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan pembahasan pada bantuan covid-19 Perbedaan : Pendekatan penelitian yang digunakan, Subyek penelitian dan Teori Good Governance

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
12.	Julide Yildirim, Servet Ozdemir. (Yuzden & Yildirim, 2014)	<i>A Qualitative Evaluation of a Conditional Cash Transfer Program in Turkey: The Beneficiaries' and Key Informants' Perspectives</i>	<i>Subject : 28 interviews with school administrator (principal), 39 interviews with teachers, and 65 interviews with health care providers. Object : Conditional cash transfer (CCT) program in Turkey</i>	<i>The research method used is a qualitative method. the type of data collection used semi-structured interviews with a total of 397 informants. to test the validity of using the method triangulation technique.</i>	<i>The results of the analysis show that the CCT program does not only positively impact health and education outcomes, but also contribute to women's empowerment and increase the self-esteem and self-confidence of beneficiary children</i>	<i>Similarities: lies in the research methods and phenomena direct cash assistance Differences: Research objects and research subjects</i>
13.	Susana Martin Belmonte, Jordi Puig.(Martín Belmonte et al., 2021)	<i>Crisis Mitigation through Cash Assistance to Increase Local</i>	<i>Subject : Umk community in the city of Barcelona, Spain</i>	<i>This research uses the case study method, research data comes from three sources, namely transaction data that comes from</i>	<i>That assistance provided in local currency REC demonstrated that it can play a role in local economic</i>	<i>Similarities: lies in the research methods and The phenomenon studied is social assistance</i>

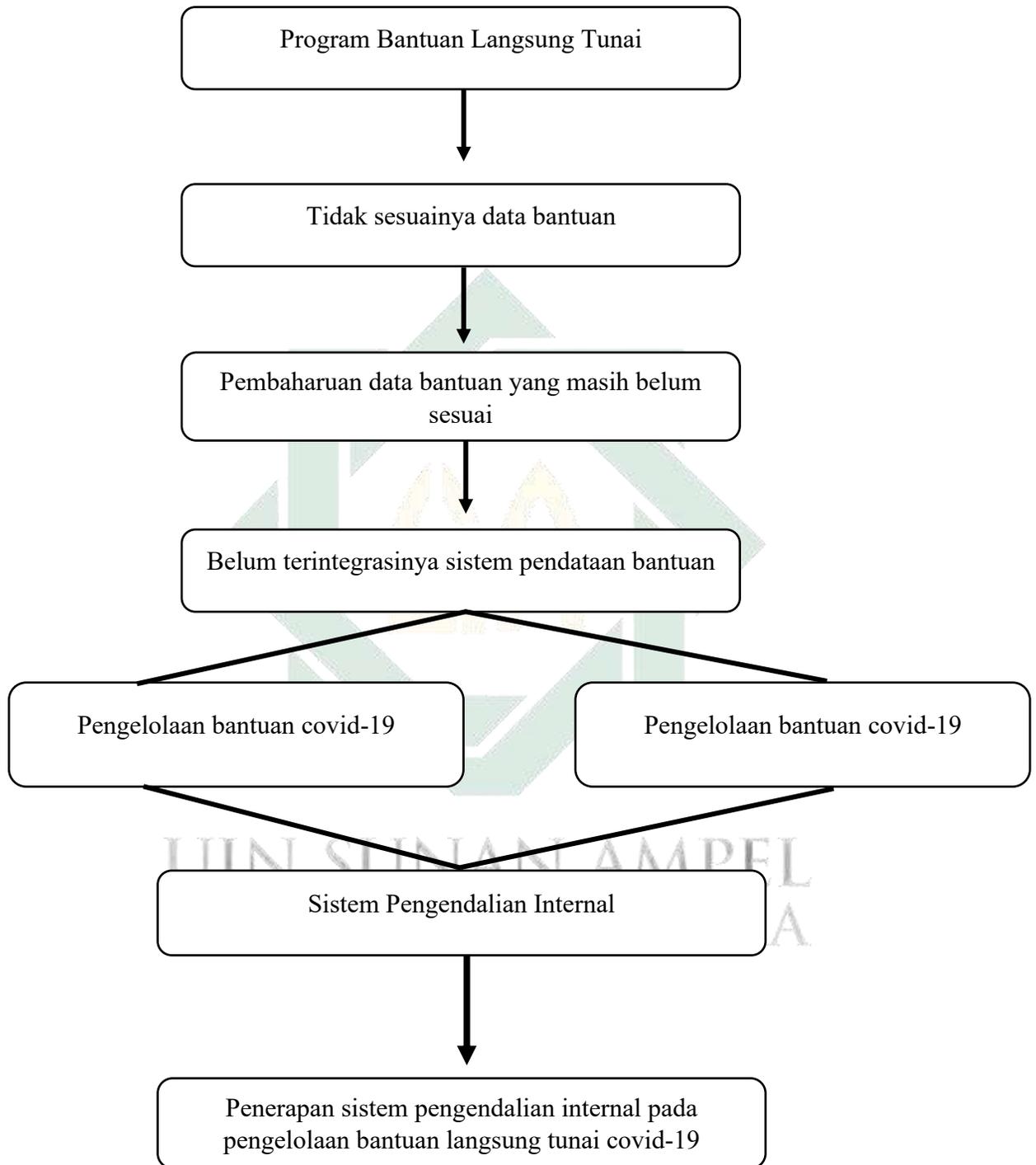
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Consumption Levels—A Case Study of a Bimonetary System in Barcelona, Spain</i>	<i>Object :cash assistance with electronic money systems or REC</i>	<i>cash assistance inclusion subsidies, data that comes from surveys of recipients of subsidies and data that comes from surveys of businesses</i>	<i>development and financial stability by maintaining local trade as well as retaining some of the income from cash transfers</i>	<i>Differences: Research objects and research subjects</i>
14.	Pablo V. Holm Nielsen, Emmanuel Raju. (Holm-Nielsen et al., 2022)	<i>The transformativ e effect of cash and voucher assistance experienced by humanitarian organizations</i>	<i>Subject : Humanitarian organizations Object : Effectiveness of master assistance and vouchers (CVA) in humanitarian organizations</i>	<i>Using qualitative research methods. in data collection using a type of semi-structured interviews with the number of respondents sebanyak 16. sampling method using purposive sampling snowball. in data analysis using coding and data presentation</i>	<i>The results of the study show that cash assistance to humanitarian organizations has changed, including not having proper management and planning, not involving local partners in the development of new modality practices.</i>	<i>Similarities: lies in the research method and data analysis Differences: research subjects and objects, data collection techniques</i>
15.	Boniface Owino.	<i>Harmonising data systems</i>	<i>Subject : Humanitarin</i>	<i>The research method used is a literature</i>	<i>Harmonization of data systems presents</i>	<i>Similarities:</i>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Subyek dan Obyek	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	(Owino, 2020)	<i>for cash transfer programming in emergencies in Somalia</i>	<i>agencies and Somalia government officials Object : Direct cash assistance program mechanism</i>	<i>review. in determining the sample using purposive sampling. data collection techniques through interviews or face-to-face discussions. the stages of data analysis, namely data reduction with the coding process so as to obtain various themes in depth</i>	<i>a long-term opportunity long-term and short-term risks to develop a robust integrated data system to provide assistance cash-based in a humanitarian context and support the implementation of social protection programs.</i>	<i>Lies in the research phenomenon, namely the direct cash assistance program Differences: Lies in research methods and research subjects</i>

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam buku Sishadiyati mendefinisikan kerangka pemikiran adalah rancangan atau konsep yang memuat gambaran mengenai hubungan teori penelitian dengan identifikasi fenomena yang dikemas melalui rumusan atau pertanyaan untuk menjawab pentingnya riset tersebut (Fachri Firdaus et al., 2021).

Sistem pengendalian internal merupakan kerangka utama yang menjadi dasar atau pedoman dalam rangkaian pengendalian pada pengelolaan bantuan dan keberhasilan pengelolaan bantuan yang tepat sasaran. Melalui identifikasi fenomena yang terjadi pada pengelolaan bantuan diketahui terdapat permasalahan yang mengarah pada pengelolaan bantuan yang masih belum tepat dan belum tercapainya pengendalian yang dilakukan sesuai dengan perspektif COSO. Sehingga menghasilkan suatu rumusan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan pengelolaan pada bantuan langsung tunai tahun 2020 di Wilayah Kalirungkt Kota Surabaya. Dari fenomena tersebut sistem pengendalian internal berperan dalam mengawasi setiap prosedur pengelolaan bantuan mulai dari pendataan sampai penetapan calon penerima bantuan sehingga mampu dipertanggungjawabkan. Adanya implementasi dari sistem pengendalian internal ini mampu menjawab permasalahan mengenai pengelolaan yang masih sering diperbincangkan dan dianggap belum sesuai dengan fakta dilapangan. Sehingga dalam penelitian ini model kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti, 2023

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan, menjelaskan, memaparkan mengenai rangkaian fakta, gejala, masalah yang sedang terjadi atau berlangsung (Noor, 2016). Jenis yang digunakan yaitu penelitian kualitatif ialah jenis riset dimana berbagai temuan, masalah penelitian tidak dapat dilakukan pengujian melalui alat bantu perhitungan atau menggunakan metode yang menggunakan pengujian matematik, komputer (Sugiyono, 2018).

Menurut Moleong dalam bukunya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menafsirkan berbagai kejadian, peristiwa yang dirasakan oleh orang lain seperti tindakan, motivasi dengan cara mendeskripsikan secara lisan atau berupa kata-kata (Moleong, 2016). Berdasarkan penjabaran dengan sudut pandang yang berbeda maka penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian atau riset yang berusaha menggali, menggambarkan, mendeskripsikan mengenai gejala atau permasalahan sosial dimana peneliti berpartisipasi secara langsung atau sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data sehingga

diperoleh suatu makna yang dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018).

3.1.1 Paradigma Interpretif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada makna dari sebuah obyek yang diamati. Proses pengamatan obyek menghasilkan sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang inilah yang dikenal dengan paradigma. Paradigma merupakan kerangka berpikir atau pedoman yang menjelaskan cara pandang peneliti dibalik fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori (Noor, 2016).

Pada penelitian ini jenis paradigma yang digunakan ialah paradigma konstruktivisme atau dikenal dengan interpretif. Melalui paradigma interpretif peneliti memperoleh informasi, menggali dan mengembangkan fenomena yang ditelusuri yaitu pengelolaan bantuan sosial dari aspek penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan pengalaman, pandangan atau kacamata informan. Paradigma interpretif menganggap bahwa individu berupaya mengamati dan memahami makna di balik realitas sosial, fenomena, fakta yang berada disekelilingnya dan mengembangkannya melalui berbagai pengalaman, kacamata secara mendalam yang dideskripsikan oleh informan sehingga memperoleh suatu sudut pandangan yang berbeda (Creswell, 2015).

3.1.2 Pendekatan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Melalui jenis penelitian tersebut maka mampu menjelaskan atau menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang akan dikaji oleh peneliti permasalahan pada pengelolaan bantuan sosial dari aspek penerapan sistem pengendalian internal.

Pendekatan studi kasus adalah model pendekatan yang penelitiannya mengeksplorasi berbagai fenomena atau berbagai kasus yang sedang berlangsung dengan metode pengumpulan data yang secara mendetail atau terperinci, melalui sumber informasi yang beragam yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi atau melalui berbagai laporan (Creswell, 2015).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi peneliti mendapatkan informasi mengenai suatu obyek yang melibatkan orang-orang didalamnya untuk menjawab masalah penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian maka peneliti perlu mempertimbangkan berbagai aspek yaitu kekurangan atau kelebihan dari lokasi tersebut, pengalaman dari penelitian terdahulu, pengalaman pribadi, dan wawancara dengan masyarakat yang berada dilokasi tersebut (Morissan, 2019).

Berdasarkan fenomena yang akan dikaji oleh peneliti, lokasi penelitian berada di wilayah Kalirungkut Kota Surabaya. Pemerintah Kalirungkut dalam penanganan covid-19 tahun 2020 menyalurkan beberapa program bantuan sosial yaitu program bantuan sosial tunai, bantuan permakanan. Dari beberapa program bantuan sosial tersebut, kemudian peneliti tertarik mengambil sebagai lokasi penelitian yang akan dikaji terkait pengelolaan program bantuan sosial.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung ketika peneliti berada di lokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2009). Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal kegiatan wawancara dengan Perangkat RT 04 (Ibu Riyanti), Perangkat Kelurahan Kalirungkut (Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Kalirungkut), Staff Dinas Sosial Kota Surabaya Bapak Esa.

Data sekunder merupakan jenis data didapatkan peneliti dari berbagai macam sumber yaitu studi kepustakaan, website, literatur yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berupa Profil Kelurahan Kalirungkut, Data penerima bantuan sosial atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), laporan hasil pendataan bantuan langsung tunai serta data terpadu kementerian sosial.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan seseorang untuk memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal atau masalah, dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Kegiatan wawancara dilakukan dengan informan yang sesuai kriteria peneliti agar data yang dihasilkan mampu menjawab masalah penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ibu Ariyanti selaku perangkat RT 04, Bapak Esa, Bapak Dede Salafiyah selaku staff dari Dinas Sosial Kota Surabaya serta Sekretaris Kelurahan Kalirungkut. Jenis media yang digunakan dalam proses wawancara sangat beragam seperti handphone, buku atau catatan memo, alat perekam suara, menggunakan *telecoference* atau pertemuan jarak jauh (google meet, zoom meeting) serta mencatat melalui memo (Iskandar, 2022).

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dimana peneliti terlibat secara langsung dengan memanfaatkan alat indera untuk melihat berbagai kejadian, permasalahan, fakta yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hasanah, 2017). Dalam kegiatan observasi (pengamatan), disela-sela melakukan kegiatan observasi peneliti mencoba mengetahui

serta ikut berpartisipasi mengenai prosedur pendataan calon penerima bantuan mulai dari penyiapan berkas hingga penentuan kriteria penerima bantuan. Keikutsertaan ini tidak sepenuhnya peneliti ikuti, melainkan hanya pada prosedur atau proses yang dianggap memiliki tingkat risiko pengendalian yang lemah. Berdasarkan pada observasi diatas maka peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi moderat. Observasi partisipasi moderat (*moderate participation*) adalah kegiatan pengamatan secara partisipatif dimana peneliti ikut melakukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh informan, namun peneliti hanya sebatas mengikuti beberapa kegiatan saja (Sugiyono, 2018).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber tertulis yang berasal dari memo, buku harian, arsip, jurnal yang merekam peristiwa dimasa lalu yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian. Keunggulan dari studi dokumentasi yaitu peneliti dapat memperoleh data lebih banyak dari berbagai sumber yang ada serta tidak mengeluarkan biaya (Gainau, n.d.). Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu Profil Kelurahan Kalirungkut, Data penerima bantuan sosial atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), laporan hasil pendataan bantuan, realisasi program bantuan sosial. laporan hasil pendataan bantuan langsung tunai serta data terpadu kementerian sosial.

3.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ialah proses pengujian berdasarkan data yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dilakukan pemeriksaan, pengujian dengan berbagai teknik. Dalam melakukan pengujian data terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan oleh periset yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam uji kredibilitas ini terdapat enam metode yaitu memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik, metode pemeriksaan data yang berasal dari teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari perbandingan dari sudut pandang yang berbeda agar memperoleh data yang valid (William Wierma, 1986) (Sugiyono, 2018). Dalam triangulasi terdapat tiga model yaitu triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang dilakukan untuk memeriksa suatu data yang dikumpulkan melalui beberapa sumber yang kompeten.

2. Triangulasi teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber yang proses pemeriksaan data dengan jenis sumber yang sama, triangulasi teknik merupakan proses

pemeriksaan, pengecekan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari sumber yang sama namun memakai metode berlainan.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan proses pengecekan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan maupun teknik lainnya kepada informan dalam waktu yang berbeda-beda (pagi, siang, sore, dan mungkin malam) (Qomar, 2022).

Dari penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu membandingkan, menggali suatu informasi dari sumber yang berbeda tetapi masih terdapat keterkaitan. Setelah melakukan wawancara, maka peneliti akan membandingkannya dengan informan lain yang berbeda namun masih berkaitan dan berkompeten terhadap fenomena yang diteliti agar memperoleh sudut pandang yang berbeda. Adapun subyek yang akan menjadi triangulasi sumber yaitu Ibu Riyanti (Perangkat RT 04) dan Bapak Esa yang merupakan staff dari Dinas Sosial Kota Surabaya.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data kualitatif tidak mudah, dibutuhkan kecermatan serta pemahaman bagi seorang peneliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat subjektif, maka peneliti dituntut untuk mempertahankan kualitas penelitiannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Sarosa, n.d.). Analisis data merupakan metode mengurutkan hasil

pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi dengan cara memilih hal-hal yang penting, mengkategorikan, mengelompokkan data dengan memberikan kode atau simbol pada setiap unit kemudian disajikan dalam bentuk uraian, paragraf yang memuat kesimpulan sehingga mudah ditafsirkan atau dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Miles and Huberman menyatakan proses analisis data kualitatif, data yang muncul merupakan data yang berbentuk kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks. Data tersebut yang didapatkan dari pengumpulan data pengamatan, wawancara, intisari dokumen dan studi dokumentasi. Miles and Huberman membagi analisis data kualitatif kedalam beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sirajuddin, 2016).

Selanjutnya pandangan dari Bogdan dalam buku Sugiyono, analisis data merupakan proses memilih, mengurutkan, menyusun data secara terstruktur yang diperoleh melalui proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disusun dalam bentuk narasi, paragraf sehingga dapat ditafsirkan atau dipahami oleh orang lain.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles and Huberman (1980) dalam buku Sugiyono. Reduksi data merupakan proses merangkum, mengambil hal yang pokok, menyederhanakan hasil pengumpulan data yang didapatkan dilapangan.

Tahap reduksi data ini peneliti melakukan penyederhanaan dari hasil pengumpulan data seperti observasi, wawancara mengenai tahapan – tahapan pada pengelolaan bantuan sosial yang sesuai dengan penerima beserta aktivitas pengendalian internal yang berada di Kalirungkut dan Dinas Sosial dengan membuat kode pada bagian-bagian tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah proses reduksi data tahapan berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun menurut kategori atau penggolongan dalam bentuk uraian atau paragraf sehingga terbentuk sebuah makna. Bentuk dari penyajian data bermacam – macam seperti grafik, tabel, narasi, dan gambar.

Dari hasil pengkodean yang diperoleh oleh peneliti dan memiliki kaitannya dengan pengelolaan bantuan yaitu mekanisme pengajuan MBR, verifikasi berkas, dan pemutakhiran atau validasi data di Dinas Sosial. Pada aktivitas pengendalian meliputi laporan pertanggung jawaban, bentuk monitoring dan pusat pengaduan atau *call center*. Proses penyajian data yang dilakukan peneliti ini disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang bertujuan peneliti memahaminya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Drawing Conclusions*)

Proses analisis data terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan masih bersifat sementara atau samar dan akan berubah ketika data – data pendukung penelitian masih belum

menjawab masalah penelitian. Namun jika kesimpulan yang diperoleh pada analisis sebelumnya serta didukung dengan bukti – bukti yang absah dan sesuai dengan proses mengumpulkan data dilapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel (Sugiyono, 2013).

Tahapan kesimpulan, peneliti mulai mencari setiap alur yang diperoleh di lokasi penelitian. Peneliti mencatat pola – pola yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan dan aktivitas pengendalian yang diungkapkan informan, data pendukung penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara teratur atau berulang kali hingga menghasilkan suatu data yang valid. Ketekunan peneliti dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan berbagai cara seperti memeriksa kembali catatan lapangan, melakukan uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi dan membaca transkrip wawancara secara berulang kali.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kota Surabaya

Surabaya merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, letak Kota Surabaya berada di $7^{\circ}9' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia setelah Jakarta sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Surabaya sekitar 326,8 km. Kota Surabaya berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara dan Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Selain dikenal dengan Kota Metropolitan, Surabaya juga dikenal sebagai Kota Pahlawan karena keberanian pemuda - pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Jumlah penduduk di Kota Surabaya berdasarkan data sensus kependudukan pada tahun 2020 per September sebanyak 2,87 juta jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 1,42 juta jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1,45 juta jiwa. Mengenai sebaran wilayah di Kota Surabaya sebagai berikut:

Kecamatan Rungkut yaitu 121,234. Kecamatan Rungkut terbagi menjadi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringan Sari, Kelurahan Medokan Ayu, Kelurahan Wonorejo, dan Kelurahan Rungkut Kidul. Kecamatan Rungkut berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukolilo
- b. Sebelah Timur : Laut
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Gunung Anyar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Tenggilis Mejoyo

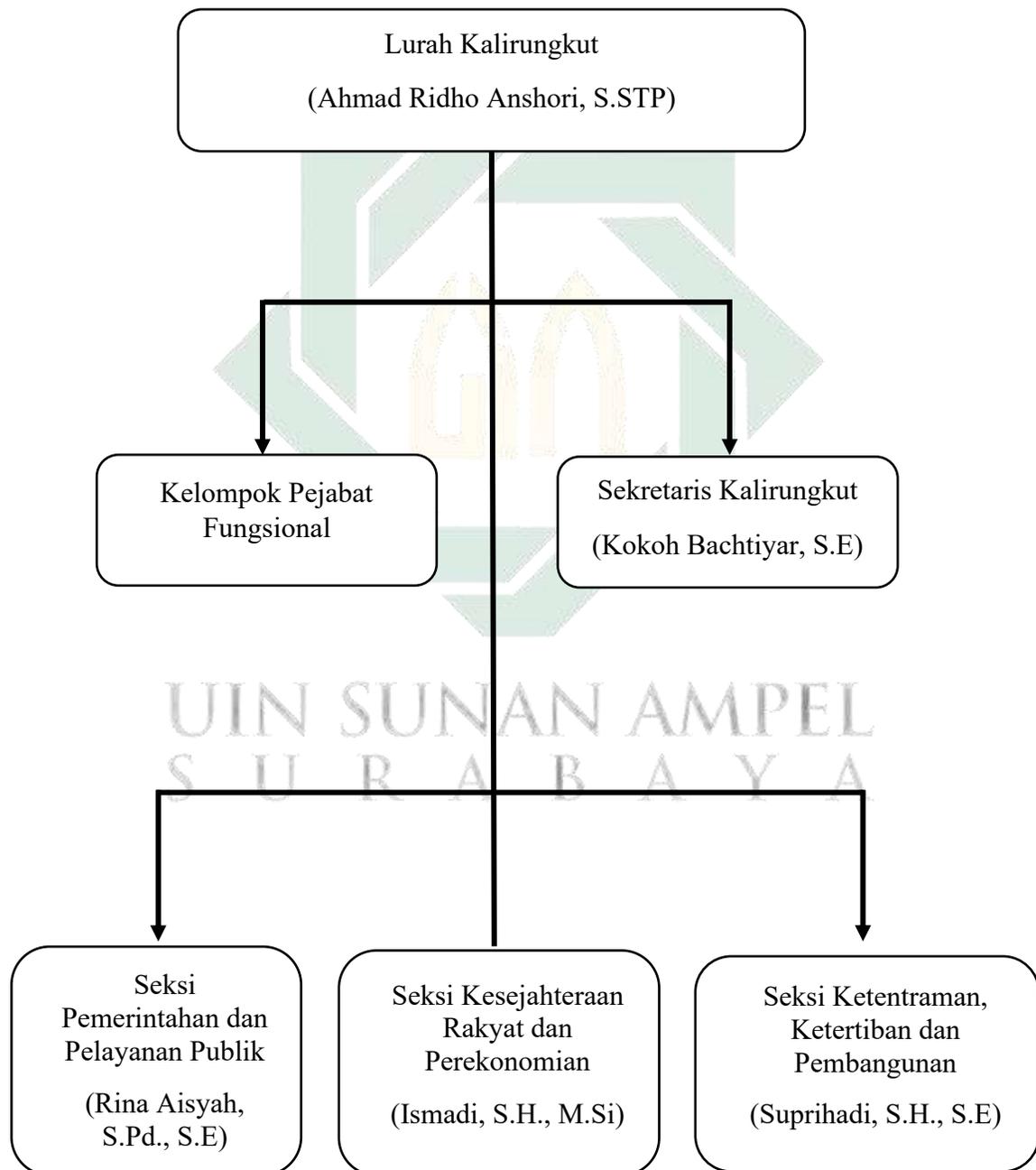
3. Kelurahan Kalirungkut

Kalirungkut merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Jumlah penduduk di wilayah Kalirungkut berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yaitu 24,184 dengan rincian laki-laki sebesar 12,008 jiwa dan perempuan sebesar 12,176 jiwa. Wilayah Kelurahan Kalirungkut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Puskesmas
- b. Sebelah Timur : Pasar Sopoyono
- c. Sebelah Selatan : KUA Rungkut
- d. Sebelah Barat : Jalan Rungkut Asri Utara

4. Struktur Organisasi Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya

Gambar 4.2 Struktur Organisasi



Sumber: Website Kelurahan Kalirungkut, diolah oleh peneliti 2023

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengendalian internal pada pengelolaan bantuan langsung tunai di wilayah Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret – Mei 2023. Subyek daripada penelitian ini merupakan perangkat RT 04, Staff Kelurahan Kalirungkut dan Staff Dinas Sosial Kota Surabaya. Obyek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan bantuan langsung tunai dengan penerapan pengendalian internal. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang diperoleh secara langsung pada saat peneliti berada di lokasi penelitian. Tahapan – tahapan yang dilakukan peneliti sebelum dan sesudah penelitian sebagai berikut :

1. Tahap Pra Penelitian

Tahapan pertama, peneliti mulai menyusun rancangan penelitian yang meliputi penentuan masalah penelitian, judul penelitian, subyek dan obyek penelitian, mengurus administrasi penelitian atau izin penelitian, melakukan pra riset sementara tentang pengelolaan bantuan sosial covid-19 dengan pengumpulan data (observasi, dan wawancara).

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengamatan terkait teknis pengajuan MBR yang berada di RT 04, pengelolaan bantuan sosial covid-19 di Kelurahan Kalirungkut dan proses pembaharuan data MBR yang berada di Dinas Sosial Kota Surabaya. Proses pengamatan yang berada di

Dalam penanganan covid-19 selain dari aspek kesehatan yang terdiri dari obat – obatan, masker, cairan disinfektan dan lainnya. Penanganan lainnya yaitu aspek sosial ekonomi. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan permakanan untuk program isoman (isolasi mandiri), Bantuan Sosial Tunai atau dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai, dan bantuan sembako. Di wilayah Kelurahan Kalirungkut dalam penanganan covid-19 menyalurkan bantuan permakanan atau makanan siap saji yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang melakukan isoman (isolasi mandiri). Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Bapak Ismadi Kasi Kesra Kelurahan Kalirungkut, sesi wawancara ini dilakukan di Kelurahan Kalirungkut yang memaparkan jenis bantuan sosial yang diberikan pada saat covid-19:

“Secara umum bantuan permakanan untuk penderita covid-19. Waktu itu anggarannya ikut dana kelurahan, sehingga pemberian makanan sehari 3x. Waktu itu 12-14 hari”(Sumber: lampiran wawancara informan kode 7).

Lebih lanjut Bapak Ismadi memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan permakanan sebagai berikut :

“Alokasi anggaran per orang dalam satu keluarga itu Rp 11.000 dalam 3 kali sehari” (Sumber: lampiran wawancara informan kode 9).

Bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan isoman (isolasi mandiri) yaitu memberikan makanan siap saji. Alokasi anggaran yang digunakan dalam bantuan permakanan berasal dari

anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2021. Perhitungan alokasi bantuan permakanan diberikan selama 3 kali sehari dengan alokasi yang dianggarkan setiap per anggota dalam satu keluarga yaitu Rp 11.000.

Jenis bantuan lainnya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai merupakan program bantuan yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di Kota Surabaya. Alokasi anggaran yang digunakan pada program Bantuan Sosial Tunai (BST) bersumber dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil diskusi yang bersama Bapak Esa staff Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 11 April 2023, beliau memaparkan sebagai berikut :

“Kalau mekasnime semua dari pusat, untuk data yang diambil dari Kemensos dari DTKS (*Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*)”
(*Sumber: lampiran wawancara informan kode 6*).

Pengelolaan bantuan sosial covid-19 merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Mulai dari data bantuan, alokasi anggaran hingga mekanisme penyaluran bantuan dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya menginformasikan data bantuan yang sesuai dengan data Kemensos yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota atau Kabupaten. Selanjutnya dari pihak kecamatan atau kelurahan menginformasikan kepada perangkat RT atau RW melalui surat undangan pencairan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat di lingkungan RT atau RW.

bertujuan memastikan kembali data yang telah diajukan ini benar dan sesuai dengan prosedur.

Maka pernyataan informan yang diperoleh maka tahapan-tahapan pada pengajuan MBR sebagai berikut:

1. Pengajuan data MBR

Bantuan sosial perlu dilakukan pengelolaan dengan baik agar bantuan yang diberikan ini sesuai dan tepat sasaran. Sebelum dikategorikan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), prosedur yang dilakukan yaitu pengusulan atau pengajuan MBR yang dilakukan di lingkungan RT hingga RW. Pengusulan terkait data MBR dilakukan secara online melalui sistem Si Keluarga Miskin yang sudah terintegrasi dengan Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat RT 04 Ibu Riyanti pada tanggal 03 Maret 2023. Dalam wawancara bersama informan yang memaparkan terkait dengan mekanisme pengajuan MBR yang dilakukan oleh Ibu Riyanti sebagai berikut :

“Pihak RT mengajukan semua warganya dimasukkan lewat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kemudian dari Dinas Sosial memvalidasi untuk menentukan layak atau tidak layaknya”
(Sumber: lampiran wawancara informan kode 9) .

Lebih lanjutnya Ibu Riyanti menjelaskan mengenai kriteria

“Pertama yang pasti janda atau duda, yang tidak mampu, tergolong fakir atau miskin, anak yatim, lansia. Kemudian kondisi rumah dan semua masuk dalam MBR” (Sumber: lampiran wawancara informan kode 11).

Proses pengajuan MBR yang dilakukan di lingkungan RT 04, Ibu Riyanti mengajukan semua warganya yang layak berdasarkan kriteria yang sesuai. Kriteria yang termasuk dalam masyarakat ber MBR yaitu fakir atau miskin, kurang mampu dalam perekonomian, penyandang sosial, janda atau duda, lansia, dan yatim piatu. Selain dari kriteria tersebut kondisi ekonomi dan sosial juga menjadi pertimbangan seperti kelayakan tempat tinggal atau hunian, aset yang dimiliki, jumlah anggota keluarga, besaran pengeluaran rumah tangga serta besaran penghasilan selama satu bulan. Berkas yang perlu dilengkapi ketika pengisian MBR yaitu pengisian NIK yang sesuai dengan data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Setelah penginputan data MBR berhasil maka akan dilakukan verifikasi berkas oleh dinas sosial untuk menentukan kelayakan calon masyarakat ber MBR.

2. Verifikasi Berkas

Verifikasi berkas merupakan tahapan yang sangat penting atau krusial. Tahapan dari verifikasi berkas yaitu pengecekan dokumen yang diajukan serta prosedur survei secara langsung kepada calon masyarakat ber MBR yang bertujuan untuk menentukan kelayakan dan menjamin kebenaran data. Data yang sudah diajukan oleh perangkat RT selanjutnya akan dilakukan verifikasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dari

verifikasi berkas di tingkat kelurahan atau kecamatan, kemudian dilakukan verifikasi kembali oleh Dinas Sosial melalui survei secara langsung.

Berdasarkan hasil diskusi bersama Bapak Esa yang diwawancarai pada tanggal 11 April 2023 terkait tahapan survei MBR yang dilakukan Dinas Sosial sebagai berikut:

“Kalau survei kita engga langsung, koordinasi dulu dengan kelurahan, rt atau rw bisa yang mengetahui wilayah itu” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 23*).

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ibu Riyanti perangkat RT 04 yang diwawancarai pada tanggal 11 April 2023 terkait berkas penunjang survei MBR, Ibu Riyanti mengatakan sebagai berikut :

“Biasanya fotocopy KTP dan KK. Tapi ada berkas penunjang form lagi dari dinas yang bersifat mendetail dan benar-benar engga cukup. Seperti kondisi rumah, pengeluaran untuk memasak” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 37*) .

Dalam pelaksanaan survei calon MBR petugas dinas sosial melakukan koordinasi dengan wilayah yang dituju melalui kecamatan, kelurahan atau dari perangkat RT. Berkas atau dokumen pendukung yang dipersiapkan ketika survei berlangsung yaitu formulir yang berisi data – data yang akan dipertanyakan kepada calon MBR secara mendetail. Selain wawancara khusus, petugas dinas sosial juga melakukan pengamatan terkait kondisi rumah dan aset lainnya yang dimiliki. Hasil dari survei nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan yang akan dibahas dalam Muskel (Musyawarah Kelurahan). Selain dari muskel pertimbangan

lainnya juga dari Dinas Sosial dalam menentukan status calon masyarakat ber MBR dan kelayakan memperoleh bantuan sosial.

3. Validasi Data

Validasi merupakan kegiatan pengesahan berkas dengan memastikan data yang diperoleh dinyatakan benar dan telah memenuhi prosedur. Rangkaian pengajuan MBR, sebelum dinyatakan valid data yang diperoleh dari hasil survei akan dilakukan musyawarah untuk memastikan data yang diperoleh benar adanya dan memenuhi prosedur pada pengajuan MBR serta perekomendasi masuk data keluarga miskin.

Hasil wawancara dengan Bapak Esa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 yang membahas tentang monitoring data bantuan dan tahapan pengajuan MBR, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Jadi sudah ada indikator kelayakan seperti apa, gambaran atau filter awal. Hasil survei dinsos terdapat muskel (Musyawarah Kelurahan) sama perangkat kelurahan rt atau rw. Dari hasil muskel benar-benar layak, dapat ditetapkan masuk data keluarga miskin” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 68*).

Lebih lanjut, sebelum ditetapkan dan masuk dalam data keluarga miskin perlu dilakukan muskel (Musyawarah Kelurahan) terlebih dahulu. Musyawarah dalam pengesahan data MBR diikuti oleh jajaran kelurahan, perangkat lingkungan rw hingga rt. Pokok pembahasan yang dibahas yaitu mulai dari indikator kriteria MBR, pengusulan MBR dilingkungan rt atau rw, pengumpulan data melalui survei MBR secara langsung oleh dinsos. Jika hasil muskel (Musyawarah Kelurahan) benar-benar dikatakan layak

dan pengusulan MBR ini telah mengikuti berbagai tahapan, maka dapat merekomendasikan untuk masuk data keluarga miskin.

Di samping tahapan-tahapan pengajuan MBR hingga penetapan data MBR, maka tentu peran pengawas internal yang dimulai dari lingkungan atau elemen terkecil (rt atau rw) hingga tingkat atas (dinas sosial) sangat penting agar tercapainya pemerataan dan transparansi bantuan sosial. Maka terdapat beberapa komponen yang membentuk pengendalian internal yang secara tidak langsung dilakukan di lingkungan RT atau RW sampai ke Dinas Sosial dalam proses pengajuan MBR baru hingga berkategori sebagai DTKS yang diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a) Struktural Organisasi

Komponen yang mencakup pada lingkungan pengendalian internal meliputi integritas dan akhlak atau etika organisasi, struktur organisasi (pendelegasian tugas dan wewenang). Bantuan sosial dalam pengelolaannya dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Program bantuan sosial melibatkan berbagai elemen baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Dinas Sosial) maupun Organisasi Perangkat Desa atau Kelurahan meliputi perangkat di lingkup rt maupun rw yang tentunya mempunyai garis tanggung jawab dan wewenang yang berbeda. Dalam pengajuan baru untuk bantuan sosial, perangkat rt maupun rw berwenang dalam

Anggaran yang dipergunakan dalam program bantuan permakanan covid-19 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan di setiap desa atau kelurahan. Pendistribusian bantuan permakanan pemerintah kelurahan berkoordinasi melalui perangkat RT atau RW untuk merinci warganya yang Penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 ini dilakukan laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh bendahara kelurahan.

3. Aktivitas Pengendalian

a) Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan aktivitas yang dilakukan manajemen dalam menilai hasil pencapaian kinerja pada karyawan dalam menyelenggarakan tanggung jawab yang diembannya, unit kerja maupun keseluruhan pada organisasi (Fauzi & A, 2020). Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 16 Mei 2023 dengan Bapak Ismadi Kasi Kesra Kelurahan Kalirungkut yang memaparkan evaluasi yang dilakukan selama bantuan covid-19 sebagai berikut:

“Jadi kami melakukan koordinasinya melalui rt rw terkait pembagian undangan” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 21*).

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai evaluasi dari segi data bantuan sebagai berikut :

“Kalau evaluasinya itu koordinasi dengan dinsos terkait data penduduk miskin” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 23*).

Dalam hal ini informan menjelaskan pendistribusian bantuan sosial covid-19, Kelurahan Kalirungkut berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu Dinas Sosial dan RT atau RW. Pembagian surat undangan telah disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam pembagiannya pihak kelurahan melakukan rapat koordinasi dengan LPMK, RT atau RW yang disesuaikan dengan domisili masing-masing. Pembagian undangan tentu sangat memudahkan masyarakat dalam pencairan bantuan.

Pendistribusian bantuan sosial tentunya mempertimbangkan beberapa aspek yaitu transparansi penerima manfaat yang dipadukan dengan DTKS dan efektivitas terhadap metode penyaluran bantuan. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program bantuan sosial secara keseluruhan telah terdistribusikan dengan tepat. Menurut pernyataan Bapak Esa yang diwawancarai tanggal 26 Mei 2023 menjelaskan evaluasi bantuan sosial sebagai berikut:

“Pertama lebih ke sasarannya kemudian metode atau teknik penyalurannya efektif atau engga kan penerima juga banyak” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 64*).

Bantuan sosial merupakan bantuan yang dialokasikan kepada masyarakat yang memiliki masalah atau kesenjangan sosial. Penentuan sasaran bantuan sosial harus jelas, tepat, dan dapat

dipertanggung jawabkan. Aspek sasaran penerima manfaat dan efektifitas metode penyaluran bantuan sosial merupakan bagian evaluasi yang ditekankan. Metode pendistribusian bantuan sosial tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi melibatkan beberapa *stakeholder* terkait seperti PT Pos Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat. Selama pendistribusian berlangsung dari Kelurahan maupun Dinas Sosial turut memantau kelancaran penyaluran bantuan sosial.

Dalam pembaharuan data penduduk miskin, Kelurahan Kalirungkut melakukan evaluasi pembaharuan data penduduk miskin diwilayahnya dengan berkoordinasi melalui Dinas Sosial. Pembaharuan data ini tentunya dilakukan pemantauan oleh Dinas Sosial melalui website yang bernama DTKS. Bentuk pemantauan yang dilakukan yaitu aktivitas pengajuan MBR baru yang diajukan oleh pihak kecamatan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang berada pada sistem pengendalian internal. informasi dan komunikasi merupakan proses pengindentifikasian, pengkomunikasian informasi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun sistem informasi yang dihasilkan berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional, keuangan,

efektivitas kepatuhan (Rai, 2008). Hasil wawancara bersama dengan perangkat RT 04 yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2023 sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi dari media terus dari kelurahan tentang kriteria atau sasaran penerima bantuan MBR” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 25*).

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Esa yang berlangsung di Dinas Sosial pada tanggal 11 April 2023 yang memaparkan terkait pengaduan atau *call center* bantuan, sebagai berikut:

“Kalau pengaduan, dinas sosial ada dua diaplikasi website sama whastapps bansos” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 36*).

Lebih lanjut wawancara yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 2023 bersama Bapak Esa yang memaparkan terkait sosialisasi bantuan sosial, sebagai berikut:

“Kita hanya memberikan sosialisasi kepada kelurahan, rt,rw bahwasannya indikator yang digunakan seperti ini. Seperti filter awal orang yang sudah diusulkan” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 70*).

Dalam penanganan bantuan sosial yang terdapat di Kota Surabaya, Dinas Sosial menyediakan layanan pusat pengaduan bantuan atau *call center* yang dapat diakses oleh masyarakat. Adapun layanan tersebut melalui whatsapp dan website dinas sosial. Kedua layanan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai data bantuan sosial. Bentuk informasi lainnya melalui kegiatan sosialisasi yang

melakukan pemberkasan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan kepada pemerintah pusat.

Selain bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dari segi pembaharuan data, bentuk pengendalian lainnya di lingkungan terkecil yaitu RT atau RW. Berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Riyanti selaku perangkat RT 04 yang dilakukan pada tanggal 11 April 2023 dengan pembahasan mengenai proses pengecekan data pengajuan MBR yang merupakan bagian dari pengendalian internal, mengatakan bahwa :

“Iya, selalu mengecek proses pengajuan sebelum finalisasi. Ibu juga gptek jadi perlu anak-anak yang paham IT” (*Sumber: lampiran wawancara informan kode 41 dan 43*).

Di lingkungan RT sendiri, Ibu Riyanti setelah melakukan pengajuan MBR sebelum finalisasi selalu melakukan pemeriksaan kembali mengenai data yang diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan agar data yang diajukan ini benar dan sesuai dengan data pendukung serta menimalisir adanya kesalahan dalam penginputan data.

Berdasarkan dari pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Esa dan Ibu Riyanti menunjukkan bagian dari aktivitas pada komponen sistem pengendalian internal yaitu monitoring. Monitoring merupakan penilaian dari keseluruhan komponen sistem pengendalian internal yang dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem yang

beroperasi apakah efektif dengan tujuan entitas yang akan dicapai. Selain dari monitoring tentu mengenali lebih dalam dengan pendekatan pada jenis pengendalian internal yaitu pengendalian preventif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya

Sistem pengendalian internal merupakan perencanaan organisasi dan semua pengukurannya yang diambil oleh perusahaan untuk mengamankan aset, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, mendorong efisiensi dan dipercainya data akuntansi (Pramana et al., 2021). Semakin baik sistem pengendalian internal pada organisasi dalam menilai dan memajemen risiko tentu berpengaruh terhadap citra suatu organisasi. Keberhasilan dalam pengimplemtasian sistem pengendalian internal tentu tidak terlepas dari semua elemen yang berada di organisasi tersebut.

Bantuan sosial merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial tentunya harus transparan, tepat, dan sesuai dengan data dari Kementerian Sosial yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aturan terkait bantuan sosial tertuang pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
30	Gubeng	Airlangga	1.105	106	Sukolilo	Medokan Semampir	1.323
31	Gubeng	Baratajaya	651	107	Sukolilo	Menur Pumpungan	756
32	Gubeng	Gubeng	1.041	108	Sukolilo	Nginden Jangkungan	887
33	Gubeng	Kertajaya	1.501	109	Sukolilo	Semolowaru	595
34	Gubeng	Mojo	2.336	110	Sukomanunggal	Putat Gede	759
35	Gubeng	Pucang Sewu	830	111	Sukomanunggal	Simomulyo	1.541
36	Gunung Anyar	Gunung Anyar	1.463	112	Sukomanunggal	Simomulyo Baru	3.308
37	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	278	113	Sukomanunggal	Sono Kwijenana	340
38	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	535	114	Sukomanunggal	Sukomanunggal	1.313
39	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	692	115	Sukomanunggal	Tanjung Sari	839
40	Jambangan	Jambangan	609	116	Tambaksari	Dukuh Setro	1.254
41	Jambangan	Karah	983	117	Tambaksari	Gading	1.576
42	Jambangan	Kebonsaari	634	118	Tambaksari	Kapasmadya Baru	4.389
43	Jambangan	Pagesangan	1.022	119	Tambaksari	Pacarkeling	2.457
44	Karang Pilang	Karang Pilang	489	120	Tambaksari	Pacarkembang	2.982
45	Karang Pilang	Kebraon	2.034	121	Tambaksari	Ploso	2.674
46	Karang Pilang	Kedurus	1.621	122	Tambaksari	Rangkah	1.479
47	Karang Pilang	Waru Gunung	762	123	Tambaksari	Tambaksari	1.734
48	Kenjeran	Bulak Banteng	2.561	124	Tandes	Balongsari	809
49	Kenjeran	Sidotopo Wetan	5.468	125	Tandes	Banjar Sugihan	1.125
50	Kenjeran	Tambak Wedi	1.473	126	Tandes	Karang Poh	959
51	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	5.119	127	Tandes	Manukan Kulon	2.050
52	Krempangan	Dupak	1.904	128	Tandes	Manukan Wetan	774
53	Krempangan	Kemayoran	1.756	129	Tandes	Tandes	648
54	Krempangan	Krempangan Selatan	1.576	130	Tegalsari	Dr. Sutomo	897
55	Krempangan	Morokrempangan	5.747	131	Tegalsari	Kedungdoro	1.920
56	Krempangan	Perak Barat	698	132	Tegalsari	Keputran	1.325
57	Lakarsantri	Bangkingan	754	133	Tegalsari	Tegalsari	2.068
58	Lakarsantri	Jeruk	695	134	Tegalsari	Wonorejo	1.843
59	Lakarsantri	Lakarsantri	686	135	Tenggiling Mejoyo	Kendangsari	935
60	Lakarsantri	Lidah Kulon	1.057	136	Tenggiling Mejoyo	Kutisari	947

Lingkungan pengendalian merupakan komponen yang paling utama atau paling mendasar dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam lingkungan pengendalian berusaha membangun kesadaran akan pentingnya pengendalian di organisasi. Lingkup daripada lingkungan pengendalian meliputi struktur organisasi, kedisiplinan, integritas, serta pendelegasian tanggung jawab (Rai, 2008).

Hasil analisis diperoleh pendelegasian tanggung jawab dan wewenang dalam program bantuan sosial telaksana sesuai dengan garis struktural organisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Sosial bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemberian layanan yang berhubungan dengan masalah kesenjangan sosial meliputi pemerataan bantuan sosial, kegiatan penginformasian terkait indikator penerima bantuan yang dilakukan di kecamatan atau kelurahan. Dari tingkat Organisasi Perangkat Desa atau Kelurahan meliputi jajaran perangkat kelurahan maupun dari rt atau rw berperan dalam menginformasian lanjutan tentang tata cara pengajuan baru data bantuan sosial yang dilakukan di masing-masing lingkungan rw maupun rt dengan proses penyeleksian tahap awal melalui Musyawarah Kelurahan. Aktivitas layanan yang berada di dinas sosial maupun kecamatan kelurahan tentu dalam pencapaian target kinerja dalam pemerataan program bantuan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal

tersebut tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

“Proses pengusulan baru dilaksanakan melalui musyawarah desa atau kelurahan seperti yang dimaksud dalam pasala 5 dan diinformasikan kepada bupati/walikota melalui dinas sosial kabupaten/kota” (Menteri Sosial, 2021).

Dalam mengembangkan tanggung jawab dinas sosial maupun perangkat kecamatan kelurahan serta rt dan rw telah memahami dan mengimplementasikan tupoksi yang diembannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

2) Penaksiran Resiko

Proses pengidentifikasian, penguraian terhadap risiko yang terjadi pada organisasi atau perusahaan sehingga dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk meminimalisir adanya risiko dapat dilakukan dengan melakukan riset dan membuat perencanaan yang baik (Rai, 2008). Pelaksanaan dalam penilaian risiko pada program bantuan sosial covid-19 di Kalirungkut telah terlaksana dengan adanya pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 melalui bantuan

permakanan. Alokasi bantuan permakanan dianggarkan sebesar Rp 11.000 yang dalam 3 kali sehari. Pengalokasian anggaran ini terdapat kendala adanya penyesuaian terhadap sasaran penerima yang tidak dapat memprediksi pendistribuan bantuan tersebut, sehingga anggaran yang dialokasikan melebihi budget yang telah ditentukan. Pelaporan penggunaan anggaran pada APBD dilakukan oleh bendahara yang disusun dalam laporan pertanggung jawaban.

Pelaporan tentang penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK.07/ 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, yang menjelaskan bahwa:

“Kepala daerah menginformasikan laporan realisasi pendanaan yang dimaksudkan pada ayat (3) yang ditetapkan paling sedikit 8% dari alokasi DAU “ (Menteri Keuangan, 2021).

3) Aktivitas Pengendalian

Suatu kebijakan, standar, aturan yang membantu menjalankan petunjuk atau arahan dari manajemen dapat dikerjakan dengan baik sesuai tujuan entitas. Adapun aktivitas pengendalian meliputi

pemisahan tugas, penilaian atas kinerja, verifikasi (Rai, 2008). Berdasarkan analisis data diperoleh aktivitas pengendalian yang dilakukan berupa evaluasi kinerja atas penyelenggaraan program bantuan sosial.

Evaluasi kinerja merupakan aktivitas yang dilakukan manajemen dalam menilai hasil pencapaian kinerja pada karyawan dalam menyelenggarakan tanggung jawab yang diembannya, unit kerja maupun keseluruhan pada organisasi (Fauzi & A, 2020). Penyelenggaraan program bantuan sosial tentu diperlukannya evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi meliputi target sasaran bantuan, pendistribusian bantuan, transparansi dan pemantauan selama program bantuan sosial berlangsung. Tujuan evaluasi untuk mengukur atau menilai keseluruhan baik secara teknik maupun pelaksanaan program bantuan sosial. Melalui hasil analisis data bahwa evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan bantuan sosial (bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai) dimasa covid-19 telah dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut dijelaskan program bantuan sosial dalam pelaksanaannya melalui beberapa prosedur sebelum bantuan tersebut disalurkan. Pada bantuan sosial covid-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai atau Bantuan Langsung Tunai menyatakan data yang digunakan berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Pemerintah Kalirungkut melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait data keluarga miskin. Pengungkapan evaluasi kinerja diperjelas menurut penelitian Orce Kabunggul (2023), dalam pelaksanaan bantuan sosial pengevaluasian tentang informasi cakupan penerima manfaat yang dinilai belum sesuai sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Selanjutnya penyaluran bantuan sosial disesuaikan dengan lingkup penerima manfaat, sehingga untuk masyarakat yang belum tercover dapat membuat surat keterangan melalui pemerintah setempat.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang berada pada sistem pengendalian internal. Informasi dan komunikasi merupakan proses pengidentifikasi, pengkomunikasian informasi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun sistem informasi yang dihasilkan berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional, keuangan, efektivitas kepatuhan (Rai, 2008). Sistem informasi memiliki peranan yang penting dalam pengendalian internal. Dari informasi tersebut dapat mengetahui keseluruhan kinerja tiap elemen yang terdapat pada suatu entitas.

Sub informasi dan komunikasi dalam penyampaian informasi bantuan sosial telah terlaksana dengan baik meliputi kegiatan sosialisasi yang memaparkan indikator sasaran penerima bantuan.. Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh jajaran perangkat kecamatan, kelurahan sampai di masing-masing RT maupun RW. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan indikator-indikator sasaran bantuan yang diharapkan pada saat pengajuan baru MBR yang dilakukan di masing-masing RT maupun RW tepat sasaran. Selain dari kegiatan sosialisasi pada indikator sasaran penerima, jajaran kelurahan Kalirungkut melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk update atau pembaharuan data yang telah dilakukan dalam Musyawarah Kelurahan. Proses musyawarah ini menekankan pada penetapan masyarakat ber MBR yang berasal dari hasil Muskel (Musyawarah Kelurahan) untuk diusulkan masuk pada data keluarga miskin.

Dalam pendistribusian bantuan sosial (bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai), Kelurahan Kalirungkut dalam menyampaikan informasi tentang pencairan bantuan kepada masyarakat di wilayahnya melalui surat undangan yang diteruskan dimasing-masing lingkungan RT maupun RW. Informasi melalui pendistribusian surat undangan ini sangat memudahkan masyarakat

dalam pengambilan bantuan. Dalam surat undangan tertera nama, nik, hari, tanggal dan lokasi pencairan.

Bentuk komunikasi lainnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tentang indikator sasaran bantuan. Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh jajaran perangkat kecamatan, kelurahan sampai di masing-masing RT maupaun RW. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan indikator-indikator sasaran bantuan yang diharapkan pada saat pengajuan baru MBR yang dilakukan di masing-masing RT maupun RW tepat sasaran. Selain dari kegiatan sosialisasi pada indikator sasaran penerima, jajaran kelurahan Kalirungkut melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk update atau pembaharuan data yang telah dilakukan dalam Musyawarah Kelurahan. Proses musyawarah ini menekankan pada penetapan masyarakat ber MBR yang berasal dari hasil Muskel (Musyawarah Kelurahan) untuk diusulkan masuk pada data keluarga miskin.

5) Monitoring atau Pemantauan

Aktivitas yang termasuk dalam komponen sistem pengendalian internal yaitu pemantauan. Pemantauan merupakan Aktivitas kontrol meliputi evaluasi, penilaian dari keseluruhan komponen sistem pengendalian internal yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem yang beroperasi apakah

efektif dengan tujuan entitas yang akan dicapai (Rai, 2008). Hasil dari review terhadap kualitas sistem pengendalian internal diharapkan menjadi evaluasi dan pengukuran terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan proses-proses yang terdapat pada organisasi yang harus dilakukan pengawasan. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber seperti studi atas pengendalian yang ada (Hery, 2019).

Pemantauan program bantuan sosial (bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai) di Kota Surabaya dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap tahapan-tahapan yang terdapat pada bantuan sosial. Pemantauan bertujuan memastikan tahapan-tahapan yang terdapat pada bantuan sosial sudah sesuai dan tepat. Dari hasil analisis data diperoleh, Dinas Sosial dalam melakukan monitoring atau pengawasan terhadap data bantuan sosial (bantuan sosial tunai) dengan memonitoring setiap pembaharuan yang masuk dilakukan secara berkala pada data keluarga miskin. Aktivitas monitoring pada pembaharuan data bertujuan memastikan setiap usulan yang telah dilakukan Musyawarah Kelurahan telah dilakukan pembaharuan oleh Dinas Sosial sehingga data yang masuk dapat diusulkan menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dari sasaran bantuan, Dinas Sosial memastikan bahwa pada antara data bantuan dan pada saat pendistribusian bantuan benar-benar

dinyatakan sesuai. Pelaksanaan pemantauan dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang menjelaskan bahwa:

“Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Menteri Sosial, 2019).

Berdasarkan aktivitas pemantauan tentang pelaksanaan bantuan sosial juga dijelaskan menurut pernyataan Evi Nainah (2022) dalam aktivitas pengawasan tentang program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Bandung yaitu memeriksa kembali dengan menyesuaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) terkait pembaharuan data masyarakat yang terdampak covid-19 atau terkena PHK.

Dari beberapa pengendalian pengelolaan bantuan sosial yang terdiri dari beberapa prosedur pengajuan MBR hingga terbentuk data DTKS. Proses manajemen bantuan sosial yang meliputi pengajuan MBR sampai berkategori dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses perancangan sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja dan pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi (Ni Wayan Dian Irmayani, 2021). Dalam penyusunan perencanaan, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan memperhatikan kompetensi atau skill yang dimiliki. Dalam teori manajemen sumber daya manusia (MSDM), pentingnya suatu perencanaan dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan sumber daya di masa depan yaitu mengkaji kembali dengan memastikan bahwa sumber daya atau aset yang terdapat di dalam suatu organisasi dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi (Sabrina & Sulasmi, 2021).

Perencanaan bantuan sosial covid-19 di Kota Surabaya khususnya di wilayah Kalirungkut dalam pengelolaannya yang meliputi proses pengajuan MBR telah sesuai dengan tahapan-tahapannya dan dipadukan dengan data Kementerian Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyatakan DTKS sebagai berikut:

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data sentral yang memuat data penyandang atau masalah sosial, kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial” (Menteri Sosial, 2021).

Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah pusat maupun daerah dapat memonitor secara langsung terkait pembaharuan data yang sewaktu-waktu dilakukan oleh

Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Data DTKS sebagai dasar acuan yang digunakan pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan. Namun penggunaan data DTKS harus dikelola secara transparan, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis data, dalam perencanaan untuk pengusulan MBR di Kota Surabaya dilakukan dengan beberapa tahapan serta kriteria khusus. Dimulai dengan pengusulan MBR baru di lingkungan RT/RW, survei MBR, dan penetapan kategori data keluarga miskin. Untuk ketentuan yang terdapat pada pengajuan MBR berdomilisi atau warga Kota Surabaya, fakir miskin, yatim piatu, berpenghasilan rendah, dan janda atau duda. Proses pengajuan MBR di Kota Surabaya dilakukan secara online melalui situs website Si Keluarga Miskin yang sudah terintegrasi dengan Dinas Sosial.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dan pengelolaan dari bantuan sosial (bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai). Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal berjalan dan terlaksana sesuai komponen-komponen yang membentuknya berdasarkan perspektif COSO.

Hal ini didukung adanya lingkungan pengendalian yaitu struktural organisasi berjalan sesuai garis tanggung jawab yang diemban. Pada penaksiran resiko yang meliputi pelaporan dalam penggunaan anggaran dari APBD telah dilakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban walaupun masih ditemukannya kendala yaitu adanya penyesuaian anggaran yang diakibatkan alokasi anggaran yang melebihi budget. Aktivitas pengendalian diterapkan melalui evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program bantuan sosial yang meliputi metode penyaluran bantuan sosial dan pembaharuan data. Informasi dan komunikasi adanya layanan pengaduan bantuan yang mudah diakses oleh masyarakat serta kegiatan sosialisasi indikator kriteria penerimaan bantuan. Aspek pemantauan dengan menatun setiap pengusulan data baru yang masuk melalui dinas sosial.

Selanjutnya dalam manajemen atau pengelolaan bantuan sosial meliputi perencanaan (penentuan kriteria bantuan beserta tahapannya) sesuai

berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

5.2 Saran

Melalui hasil riset yang dilapangan, peneliti memberikan masukan atau saran yang ditujukan kepada Kelurahan Kalirungkut, Dinas Sosial Kota Surabaya serta bagi peneliti yang selanjtnya sebagai berikut:

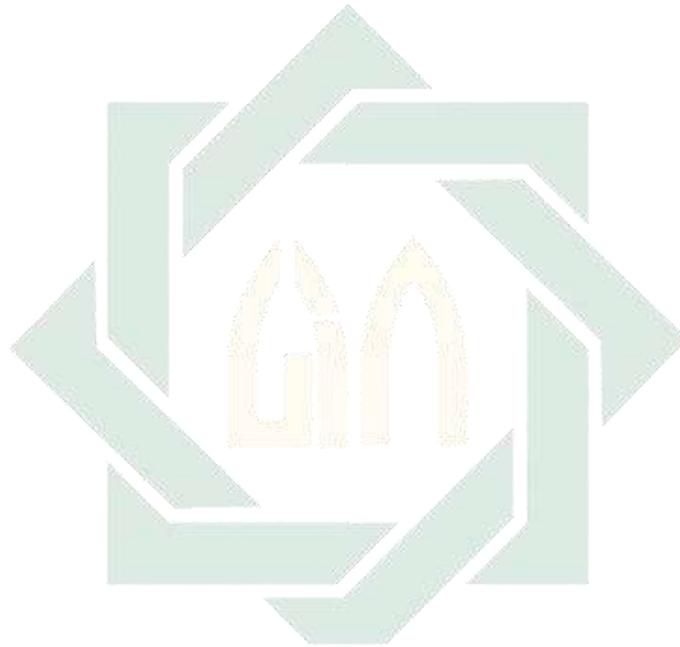
5.2.1 Bagi Kelurahan Kalirungkut dan Dinas Sosial

Dari beberapa unsur-unsur dalam pengendalian internal, hendaknya aspek informasi dan komunikasi (kegiatan sosialiasasi) serta monitoring (pembaharuan data miskin, sasaran bantuan) perlu dilakukan evaluasi dan ditingkatkan lagi. Pihak kelurahan dapat memanfaatkan website yang ada dalam penginformasian prosedur pengajuan baru bantuan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu dari monitoring terhadap pembaharuan data miskin, sasaran penerima bantuan perlu dilakukan pemfilteran secara berkelanjutan agar sasaran bantuan dinyatakan valid. Pentignya pengendalian internal aktivitas pemantauan agar pengajuan data baru sebelum dikategorikan sebagai DTKS dapat diminimalisir double data keluarga miskin dan double penerima bantuan

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan riset dan ingin memperdalam tentang pengelolaan bantuan sosial dari sudut pandang

sistem pengendalian internal dapat memperluas cakupannya tidak hanya pengendalian internal melainkan pada akuntabilitas anggaran bantuan sosial.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=hHeDEAAAQBAJ>
- Kabunggul, O., Husnaeni, Y., Digidowiseso, K., Pascasarjana, S., & Nasional, U. (2023). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 5, 2331–2343. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3495>
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, J. H. S. (2009). *Audit Internal Sawyers*. Salemba Empat.
- Martín Belmonte, S., Puig, J., Roca, M., & Segura, M. (2021). Crisis Mitigation through Cash Assistance to Increase Local Consumption Levels—A Case Study of a Bimonetary System in Barcelona, Spain. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9), 430. <https://doi.org/10.3390/jrfm14090430>
- Menteri Dalam Negeri. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali*.
- Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/20221 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi C*.
- Menteri Sosial. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*.
- Menteri Sosial. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ>
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Ayu, S., Pasaribu, E.,

- Lolita, S., Delia, M., Yuniar, U., Reviyanti, V., & Yulistian, &. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1277.
- Ni Wayan Dian Irmayani, S. E. M. M. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=KadcEAAAQBAJ>
- Ningsih, I. (2022). *Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*. 7(1), 69–77.
- Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=VnA-DwAAQBAJ>
- Nurwani, N. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 31. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.565>
- Owino, B. (2020). Harmonising data systems for cash transfer programming in emergencies in Somalia. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00077-1>
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan (Pasal 1 A Ayat 1)*.
- Pramana, C., Utama, A., Ririmasse, O., Djuanda, G., Christianty, R., Wijaya, I. G. B., Syafaat, F., Siahainenia, S., & Mashadi, M. (2021). *Dasar Ilmu Manajemen. Media Sains Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=-mU7EAAAQBAJ>
- Prof. Dr. H. Mujamil Qomar, M. A. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*. inteligensia media. <https://books.google.co.id/books?id=NwKeEAAAQBAJ>
- Puryanti, Herdiana, D., & Damayanti Tri. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 3878–3889.

- Rai, I. G. A. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Salemba Empat. <https://books.google.co.id/books?id=duY317kfkXoC>
- Risky, R. (2020). *Ekonomi Lemah Tak Tercatat, Bantuan di Surabaya Tidak Tepat Sasaran*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/surabaya/09/05/2020/ekonomi-lemah-tak-tercatat-bantuan-di-surabaya-tidak-tepat-sasaran/>
- Sabrina, R., & Sulasmi, E. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. umsu press. <https://books.google.co.id/books?id=GodIEAAAQBAJ>
- SaifulMujani. (2020). *49 Persen Warga Menilai Bansos Terkait Covid-19 Tak Mencapai Sasaran*. Saifulmujani.Com. <https://saifulmujani.com/49-persen-warga-menilai-bansos-terkait-covid-19-tak-mencapai-sasaran/>
- Saragih, J. P., Budiyanti, E., Silalahi, S. A. F., Surya, T. A., & Rusastra, I. W. (2021). *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi. Publica Indonesia Utama*. <https://books.google.co.id/books?id=yQ9UEAAAQBAJ>
- Sarosa, S. (n.d.). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius. <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ>
- Sirajuddin, S. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Siti Nur Aida. (2021). *Kitab Sejarah Covid-19*. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=JcAIEAAAQBAJ>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ>
- Suarsana, G. (2022). *Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village* 12(2), 413–422. <https://repo.undiksha.ac.id/9550/>
- Sudarmanto, E., Krisnawati, A., Purba, S., Revida, E., Kadar, M. G., Yasmi, Y., Harizahayu, H., Yudha, A. Z., Teri, T., & Aulia, T. Z. (2021). *Sistem Pengendalian Internal. Yayasan Kita Menulis*.

